
PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KREDIT SEBAGAI UPAYA MENJAGA KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF YANG SEHAT DI PT. BPR CENTRAL NIAGA SURABAYA

Maurelyn Marchelina¹

¹Universitas Widya Kartika

Abstrak

Tujuan riset ini untuk memberi gambaran Standar Operasional Prosedur Kredit diimplementasikan dan untuk menggambarkan manfaat Standar Operasional Prosedur Kredit terhadap Kualitas Aktiva Produktif di PT. BPR Central Niaga Surabaya. Yang menjadi *sample* dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) file dokumen kredit dengan teknik pengambilan sampling (1) Debitur perorangan sebagai karyawan atau wiraswasta, (2) Debitur dengan nominal pinjaman antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (3) Dokumen kredit yang akad kreditnya pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan dokumen kredit yang akad kreditnya pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember (4) Jenis pinjaman dengan angsuran pokok dan bunga. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT. BPR CNS telah berupaya untuk meminimalkan penyimpangan proses pencairan kredit dengan membuat kebijakan tambahan atau penyesuaian SOP Kredit sesuai dengan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Terbukti dengan berkurangnya penyimpangan proses kredit setelah adanya penyesuaian / tambahan kebijakan SOP Kredit. Karyawan yang menangani proses kredit telah berupaya menjalankan SOP Kredit dengan tertib dalam proses pencairan kredit sehingga kualitas aktiva produktif PT. BPR CNS menjadi “Sehat” pada bulan Desember 2022. PT. BPR CNS wajib menyusun SOP Kredit secara lengkap dan memadai sebagai pedoman analisis dan evaluasi dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Terjadinya kredit bermasalah sebagian besar disebabkan prosesnya tidak sesuai dengan SOP Kredit yang telah dibuat sendiri oleh bank sehingga berdampak pada penilaian kualitas aktiva produktifnya.

Kata kunci: Standar Operasional Prosedur Kredit, Kualitas Aktiva Produktif

Abstract

Study aims to describe the Credit Standard Operating Procedures applied and to describe the benefits of Credit Standard Operating Procedures on Earning Asset Quality at PT. BPR Central Niaga Surabaya. The samples in this study were 10 (ten) credit document files using sampling techniques (1) individual debtors as employees or entrepreneurs, (2) debtors with a loan nominal between Rp.50,000,000.- (fifty million) to 500,000,000.- (five hundred million rupiahs), (3) Credit documents whose credit agreements are from June 2021 to December 2021 and credit documents whose credit agreements are from June 2022 to December (4) Types of loans with installments of principal and interest. Based on the results of the research that the authors have done, it can be concluded that PT. BPR CNS has attempted to minimize irregularities in the credit disbursement process by making additional policies or adjusting Credit SOPs in accordance with directions from the Financial Services Authority. Evidenced by the reduction in credit process irregularities after adjustments / additions to the Credit SOP policy. Employees who handle the credit process have tried to carry out Credit SOPs in an orderly manner in the credit disbursement process so that the quality of productive assets of PT. BPR CNS becomes “Healthy” in December 2022. PT. The BPR CNS is required to prepare a complete and adequate Credit SOP as a guideline for analysis and evaluation in the framework of granting credit facilities. The occurrence of non-performing loans is largely due to the process not being in accordance with the credit SOP that has been made by the bank itself, which has an impact on assessing the quality of its earning assets.

Keywords: Standard Operating Procedures for Credit, Quality of Productive Activities

I. PENDAHULUAN

BPR sangat bergantung pada kredit sebagai sumber pendapatan, oleh karena itu sangat penting bagi mereka untuk menjaga reputasi kredit mereka setiap saat untuk memastikan keberhasilan perusahaan mereka. Oleh karena itu, penting bagi BPR untuk senantiasa mengikuti konsep kehati-hatian dalam memberikan kredit, untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan berkualitas tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan perkreditan, BPR wajib memiliki Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.03/2018. Pedoman kebijakan perkreditan tersebut secara garis besar memuat kebijakan pokok dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, transparansi karakteristik kredit yang ditawarkan, kejelasan materi perjanjian kredit dan pengikatan agunan. Untuk selanjutnya BPR menjabarkan kebijakan perkreditan bank tersebut melalui suatu pedoman teknis penyaluran kredit dalam Standar Operasional Prosedur Kredit yang bertujuan untuk menjamin kesamaan tindakan – tindakan seluruh bagian yang berkaitan dengan perkreditan, menjaga kualitas proses perkreditan dimulai dari tahap permohonan kredit, tahapan pengambilan keputusan kredit, realisasi atau dropping kredit hingga kredit dinyatakan lunas kembali. Calon nasabah atau calon debitur yang mengajukan kredit di PT. BPR Central Niaga Surabaya (PT. BPRCNS) wajib mengikuti proses dan sanggup memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur mulai dari pengajuan permohonan kredit secara tertulis dan lengkap disertai dokumen persyaratan kredit, bersedia untuk disurvei dan diwawancara di tempat tinggal atau usahanya serta penandatanganan akad kredit. Namun dari hasil pengamatan penulis pada saat mempelajari beberapa file kredit masih terdapat beberapa proses pencairan kredit yang menyimpang dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit di PT. BPRCNS. Penyimpangan tersebut tertulis dalam lembaran memo intern dan disetujui oleh pejabat yang berwenang diantaranya adalah penyimpangan persyaratan kredit, plafon kredit melebihi nilai agunan kredit, suku bunga kredit, jangka waktu kredit dan biaya – biaya kredit. Tidak terpenuhinya sumber daya manusia sesuai struktur organisasi yang ada di BPRCNS menyebabkan terjadinya rangkap jabatan pegawai. Hal ini menimbulkan pemisahan wewenang yang tidak tegas dari para pegawai sehingga pegawai tidak memahami Standar Operasional Kredit yang sudah ada dan lemahnya sistem pengawasan.

Dengan adanya kedisiplinan dan pengawasan terhadap proses pencairan kredit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Kredit diharapkan PT. BPRCNS dapat memberikan keputusan yang baik dalam persetujuan pemberian kreditnya sehingga kualitas aktiva produktif sebagai salah satu aset BPR selalu terjaga dengan baik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah 10 (sepuluh) file dokumen kredit. *Tempat pelaksanaan penelitian ini di BPR Central Niaga Surabaya pada bulan oktober 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Prof.Dr.Afrizal (2019), teknik penelitian adalah suatu pendekatan yang membantu peneliti menemukan solusi atas permasalahannya. Menurut Prof.Dr.Afrizal (2019), pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang telah terkumpul dan dengan demikian tidak meneliti angka-angka, melainkan mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata. (lisan atau tulisan) dan aktivitas manusia.*

Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Peneliti mempelajari dan mengamati Standar Operational Prosedur Kredit yang telah ada, untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen – dokumen kredit nasabah, mengamati analisa kredit , biaya – biaya kredit dan catatan penyimpangan – penyimpangan prosedur kredit yang didokumentasikan oleh bagian administrasi kredit. Peneliti mengutip hasil

wawancara dengan pegawai bagian administrasi kredit, kepala bagian kredit dan pimpinan PT. BPRCNS.

Populasi dalam penelitian ini adalah daftar nominatif kredit yang mencatat nama-nama debitur secara berurutan berdasarkan nomor rekening kredit, mencatat nominal plafon kredit, sisa kredit, suku bunga kredit, jangka waktu kredit, tanggal akad kredit, tanggal jatuh tempo kredit dan agunan kredit. Yang menjadi sample dalam

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab penyimpangan Standar Operasional Prosedur Kredit di PT. BPRCNS yaitu: adanya permohonan tambahan plafon kredit atau pengajuan kredit baru setelah kredit yang lama lunas yang diajukan oleh debitur dengan *record* pembayaran lancar, debitur dikenal baik oleh pemegang saham / pengurus bank / karyawan PT. BPRCNS, agunan berupa deposito di PT BPRCNS.

Jenis – Jenis Penyimpangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit di PT. BPRCNS adalah : Penyimpangan persyaratan dokumen kredit, catatan kredit bermasalah calon debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), penyimpangan agunan kredit, penyimpangan pemberian suku bunga dan biaya – biaya kredit, lokasi usaha pemohon di luar jangkauan wilayah kerja BPR.

Tabel 1
Penyimpangan SOP Kredit PT. BPRCNS

No.	JENIS PENYIMPANGAN	JUMLAH FILE KREDIT YANG MENYIMPANG
1	Persyaratan Dokumen Kredit : a. Tidak memiliki NPWP, legalitas usaha. b. Usia debitur diatas 60 tahun pada saat kredit lunas. c. Tidak bersedia didaftarkan Asuransi Jiwa d. Jangka waktu kredit diatas 5 tahun	1 1 0 0
2	Terdapat catatan kredit bermasalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	3
3	Agunan : a. Plafon kredit melebihi nilai Agunan b. Usia agunan kendaraan bermotor lebih dari 5 tahun pada saat kredit berakhir. c. Kredit tanpa agunan (KTA)	2 0 1
4	Suku Bunga Dan Biaya Kredit : a. Suku bunga dibawah <i>Counter Rate</i> b. Biaya Provisi kurang dari 1 %	4 3
5	Lokasi Usaha Pemohon di luar batasan wilayah kerja BPR	1

Dari tabel penelitian terhadap 10 (sepuluh) data file kredit tersebut diatas dapat diketahui bahwa penyimpangan terbanyak terhadap SOP Kredit di PT. BPRCNS adalah penyimpangan suku bunga kredit di bawah ketentuan BPR yaitu sebanyak 4 file kredit. Penyimpangan SOP Kredit dalam hal pemberian suku bunga dan biaya provisi di bawah ketentuan bank seharusnya tidak diperkenankan karena berakibat pendapatan bunga kredit yang merupakan sumber utama penghasilan BPR akan berkurang.

1. Peneliti berpendapat perlu dibuat kebijakan tambahan atau penyesuaian SOP Kredit agar pelanggaran yang sama tidak dilakukan berulang – ulang dan untuk kepentingan perkembangan bisnis BPR itu sendiri. Kebijakan tambahan telah dibuat oleh PT. BPR CNS pada bulan Juni 2022 sesuai dengan arahan dari pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peneliti mencatat penyesuaian SOP Kredit sebagai berikut:

Tabel 2 SOP
Kredit Sebelum Dan Sesudah Penyesuaian

Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian SOP Kredit
<p><u>Persyaratan dokumen kredit</u> :</p> <p>a. Pemohon kredit perorangan baik karyawan maupun swasta, badan usaha wajib menyerahkan NPWP</p> <p>b. Usia pemohon minimal 21-55 tahun, maksimal 60 tahun pada saat kredit jatuh tempo.</p> <p>c. Jangka waktu kredit maksimal 5 tahun.</p>	<p><u>Persyaratan dokumen kredit</u></p> <p>a. Pemohon kredit perorangan untuk karyawan tidak wajib menyerahkan NPWP, untuk pemohon kredit wiraswasta diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) wajib menyerahkan NPWP, sedangkan untuk pemohon kredit badan usaha wajib menyerahkan NPWP.</p> <p>b. Usia debitur lebih dari 60 tahun pada saat kredit lunas diperbolehkan apabila agunan kredit berupa bilyet deposito di PT. BPR CNS atau pengajuan kredit atas nama perusahaan.</p> <p>c. Jangka waktu kredit maksimal 8 tahun.</p>
<p><u>Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK):</u> Pemohon tidak memiliki catatan kredit bermasalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).</p>	<p><u>Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK):</u> Catatan Riwayat kredit bermasalah pada SLIK pemohon dapat dipertimbangkan apabila riwayat tersebut tercatat 5 tahun sebelum pemohon mengajukan kredit di PT. BPR CNS.</p>
<p><u>Agunan Kredit :</u></p> <p>a. Batas maksimum pemberian plafon kredit untuk kendaraan bermotor sebesar 60 % dari harga pasar.</p> <p>b. Batas maksimum pemberian plafon kredit untuk agunan bilyet deposito sebesar 80 % dari nominal deposito yang diblokir dan diterbitkan oleh PT. BPR CNS.</p>	<p><u>Agunan Kredit :</u></p> <p>a. Batas maksimum pemberian plafon kredit untuk kendaraan bermotor sebesar 75 %.</p> <p>b. Batas maksimum pemberian plafon kredit untuk agunan bilyet deposito sebesar 95 % dari nominal deposito yang diblokir dan diterbitkan oleh PT. BPR CNS.</p>

<p><u>Kredit Tanpa Agunan (KTA) :</u> Belum ada SOP Kredit Tanpa Agunan.</p>	<p><u>Menyusun SOP Kredit Tanpa Agunan (KTA):</u></p> <p>a. Tujuan kredit KTA hanya untuk keperluan konsumtif karyawan perusahaan atau instansi swasta dengan membuat suatu perjanjian kerjasama dengan bagian personalia perusahaan tersebut sebagai pemotong gaji untuk pembayaran angsuran kredit di PT. BPRCNS.</p> <p>b. Total limit KTA sebesar 10 % dari total kredit yang diberikan PT. BPRCNS kepada debitur.</p> <p>c. Jangka waktu kredit KTA maksimal 1 tahun.</p> <p>d. Suku bunga kredit KTA 5 % diatas <i>counter rate</i> yang berlaku.</p> <p>e. Wajib ikut serta dalam asuransi jiwa.</p>
<p><u>Suku bunga kredit :</u> PT. BPRCNS tidak melakukan penyesuaian <i>counter rate</i> sejak Agustus 2020 sampai dengan Juni 2022 dengan rata – rata bunga kredit sebesar 15 % per tahun.</p>	<p><u>Suku bunga kredit :</u> Membuat <i>counter rate</i> baru pada bulan Juni 2022 dengan rata – rata bunga kredit sebesar 12 % per tahun dengan memperhatikan perhitungan suku bunga dasar kredit bank (<i>base lending rate</i>) dan besarnya suku bunga penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku.</p>
<p><u>Batasan wilayah kerja BPR :</u> Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Malang.</p>	<p><u>Batasan wilayah kerja BPR :</u> Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Malang dan kota Jakarta</p>

2. Untuk mengetahui sejauh mana tambahan kebijakan SOP Kredit di PT. BPRCNS telah dilakukan, maka peneliti memeriksa dan mencatat penyimpangan SOP Kredit sebelum dan sesudah adanya tambahan kebijakan. dalam tabel berikut :

Tabel 3

Perbandingan Penyimpangan SOP Kredit PT. BPRCNS
Sebelum Dan Sesudah Adanya Tambahan Kebijakan

No.	Jenis Penyimpangan	Jumlah File Kredit Yang menyimpang sebelum ada penyesuaian SOP Kredit (Juni – Desember 2021)	Jumlah File Kredit Yang menyimpang setelah ada penyesuaian SOP Kredit (Juni – Desember 2022)
1	Persyaratan Dokumen Kredit : a. Tidak memiliki NPWP, legalitas usaha	1	0

	b. Usia debitur diatas 60 tahun pada saat kredit lunas	1	0
	c. Tidak bersedia didaftarkan Asuransi Jiwa	0	0
	d. Jangka waktu kredit diatas 5 tahun	0	0
2	Terdapat catatan kredit bermasalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	3	1
3	Agunan : a. Plafon kredit melebihi nilai Agunan b. Usia agunan kendaraan bermotor lebih dari 5 tahun pada saat kredit berakhir c. Kredit tanpa agunan (KTA)	2 0 1	1 0 0
4	Suku Bunga Dan Biaya Kredit : d. Suku bunga dibawah <i>Counter Rate</i> e. Biaya Provisi kurang dari 1 %	4 3	0 0
5	Lokasi Usaha Pemohon di luar batasan wilayah kerja BPR	1	0

Berdasarkan data berkas kredit tersebut diatas dapat diketahui bahwa penyimpangan SOP pencairan kredit setelah adanya tambahan kebijakan menjadi lebih sedikit (berkurang), namun perlu adanya kedisiplinan dan pemahaman resiko kredit dari karyawan yang menangani proses kredit dalam melaksanakannya.

3. Kualitas Aktiva Produktif PT. BPR Central Niaga Surabaya

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai secara kualitatif dengan melihat permodalan, aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditasnya. Ini hanya beberapa komponen yang berkontribusi pada kesehatan dan pertumbuhan bank secara keseluruhan (CAMEL). Penulis penelitian ini hanya terfokus pada status kesehatan PT.BPR CNS berdasarkan Peraturan Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 30/12/KEP/DIR Tahun 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkatan BPR membatasi BPR CNS pada unsur kualitas Aktiva Produktif. Uang dari BPR diinvestasikan pada Aktiva Produktif dengan batasan sebagai berikut:

Penilaian Rasio KAP:

Rasio KAP $\geq 22,5\%$ NK=0

Setiap penurunan 0,15% NK 1, max 100

Hasil Penilaian:

0,00% s/d $\leq 10,35\%$ Sehat

$>10,35\%$ s/d $\leq 12,60\%$ Cukup Sehat

$>12,60\%$ s/d $\leq 14,85\%$ Kurang Sehat

$>14,85\%$ Tidak Sehat

Direksi BPR wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva produktif tetap “Sehat”. Peneliti menyajikan data kualitas aktiva produktif PT. BPRCNS periode Desember 2021 dan Desember 2022 untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan tingkat kesehatan kualitas aktiva produktif pada periode tersebut :

Tabel 4
Komposisi Aktiva Produktif

KRITERIA	Desember 2021 (Dlm ribuan)	Desember 2022 (Dlm ribuan)
Lancar	9.271.446	12.197.210
Dalam Perhatian Khusus	1.115.075	413.970
Kurang Lancar	333.184	0
Diragukan	189.163	26.228
Macet	2.119.916	2.168.494
Penempatan Pada Bank Lain (diluar giro)	7.291.080	8.917.331
Total Aktiva Produktif	20.319.866	23.723.233
Aktiva Produktif Diklasifikasikan		
KRITERIA	Desember 2021 (Dlm ribuan)	Desember 2022 (Dlm ribuan)
Kurang Lancar (50%)	166.592	0
Diragukan (75%)	141.872	26.228
Macet (100%)	2.119.916	2.168.494
Total	2.428.381	2.194.722
Rasio KAP	11,95 %	9,25 %
Hasil Penilaian	Cukup Sehat	Sehat

Dari perhitungan rasio kualitas aktiva produktif diatas, bulan Desember 2021 rasio yang dihasilkan 11,95 %, termasuk dalam penilaian kualitas aktiva produktif “Cukup Sehat”. Pada bulan Desember 2022 rasio kualitas aktiva produktif yang dihasilkan sebesar 9,25 % termasuk dalam penilaian kualitas aktiva produktif “Sehat”. Turunnya rasio kualitas aktiva produktif bulan Desember 2021 dibandingkan dengan bulan Desember 2022 menggambarkan kualitas aktiva produktif PT. BPRCNS semakin membaik. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya karyawan yang menangani proses kredit untuk menjalankan SOP Kredit dengan tertib, hal lain yang menyebabkan kualitas aktiva produktif BPR membaik adalah penyelesaian kredit nasabah yang berada dalam komponen aktiva produktif kurang lancar dan diragukan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT. BPRCNS telah berupaya untuk meminimalkan penyimpangan proses pencairan kredit dengan membuat kebijakan tambahan atau penyesuaian SOP Kredit sesuai dengan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Terbukti dengan berkurangnya penyimpangan proses kredit setelah adanya penyesuaian / tambahan kebijakan SOP Kredit. Karyawan yang menangani proses kredit telah berupaya menjalankan SOP Kredit dengan tertib dalam proses pencairan kredit sehingga kualitas aktiva produktif PT. BPRCNS menjadi “Sehat” pada bulan Desember 2022. PT. BPRCNS wajib menyusun SOP Kredit secara lengkap dan memadai sebagai pedoman analisis dan evaluasi dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Terjadinya kredit bermasalah sebagian besar disebabkan prosesnya tidak sesuai dengan SOP Kredit yang telah dibuat sendiri oleh bank sehingga berdampak pada penilaian kualitas aktiva produktifnya.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. (vol.4 Juni). Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Bank Indonesia. (2011). *Penilaian Kualitas Aktiva Produktif*. Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (No.13/13/PBI/2011), from <https://bankindonesia.go.id>

Hery. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (pp.46-47). Jakarta : PT Grasindo.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat* (No.33/POJK.03/2018), from <https://www.ojk.go.id>

Sekaran, Uma & Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan PengembanganKeahlian* (ed.6,vol.2). Jakarta Selatan 12610: Salemba Empat.